

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 12

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang terjadi pada tahun 2007 dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta dengan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LRNI tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LRNI tahun 2007 Nomor 47, TLRNI Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang semula berjumlah Rp.580.627.531.152,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 19.470.294.294,- sehingga menjadi Rp. 600.097.825.446,- dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Daerah		
1) Semula	Rp.556.289.611.000,	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.841.644.643,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.563.131.255.643,-

2	Belanja Daerah		
1)	Semula	Rp.580.627.531.152,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.470.294.294,-</u>	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.600.097.825.446</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp.36.966.569.803,-
3	Pembiayaan Daerah :		
a.	Penerimaan		
1)	Semula	Rp. 26.354.920.152,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.628.649.651,-</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 38.983.569.803,-</u>
b.	Pengeluaran		
1)	Semula	Rp. 2.017.000.000,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 2.017.000.000,-</u>
	Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 36.966.569.803,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 2

1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Pendapatan Asli Daerah		
1)	Semula	Rp. 51.199.198.309,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.938.002.213,-</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 54.137.200.522,-
b.	Dana perimbangan		
1)	Semula	Rp.458.708.633.407,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 911.802.546,-</u>	
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 459.620.435.953,-
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1)	Semula	Rp. 46.381.779.284,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.991.839.884,-</u>	

	Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	49.373.619.168,-
2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pajak daerah		
	1) Semula	Rp.	20.340.358.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(566.481.984,-)</u>
	Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	19.773.876.016,-
	b. Retribusi daerah		
	1) Semula	Rp.	19.914.007.239,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.606.830.761,-</u>
	Jumlah Retribusi daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	21.520.838.000,-
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	1.859.564.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>68.918.000,-</u>
	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	1.928.482.000,-
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp.	9.085.269.070,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.828.735.436,-</u>
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	10.914.004.506,-
3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
	a. Dana bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	59.576.633.407,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>911.802.546,-</u>
	Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	60.488.435.953,-
	b. Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp.	366.484.000.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	366.484.000.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 32.648.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 32.648.000.000,-

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 0,-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 29.774.034.550,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.884.774.550,-)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 27.889.260.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 0,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 16.607.744.734,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.876.614.434,-</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 21.484.359.168,-

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.318.608.751.718,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.876.661.797,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 332.485.413.515,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.262.018.779.434,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.593.632.497,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.267.612.411.931,-

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.257.980.972.878,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.930.827.992,-</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 260.911.800.870,-

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,-

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 17.453.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.250.500.000,-</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 26703.500.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 25.249.462.840,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1965.675.305,-</u>	

	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	27.215.138.145,-
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	15.000.000.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>229.658.500,-</u>
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	15.229.658.500,-
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp.	1.425.316.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,-</u>
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	1.925.316.000,-
h.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	1.500.000.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,-)</u>
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,-
3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp.	54.783.077.150,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>874.151.900,-</u>
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	55.657.229.050,-
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp.	124.180.713.780,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.832.229.997,-</u>
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	128.012.943.777,-
c.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp.	83.054.988.504,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>887.250.600,-</u>
	Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.	83.942.239.104,-

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 26.354.920.152,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.628.649.651,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 38.983.569.803,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.017.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.017.000.000,-

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 23.354.920.152,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.046.054.450,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan		Rp. 35.400.974.602,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,-

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp.	0,-

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>582.595.201,-</u>		
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp.	582.595.201,-

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	2.017.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp.	2.017.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp.	0,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Ringkasan Perubahan APBD;
2. Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Oktober 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Nopember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

DUDUNG B SUPARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 12 SERI**

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Oktober 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Nopember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

ttd.

DUDUNG B SUPARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 12 SERI**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.PURWAKARTA**

**MOHAMAD RIFAI,SH
NIP. 010 169 040**

